

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam Upaya Pemberantasan dan Penanggulangan Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Kecamatan Kuta Selatan

Devi Gita Ananda¹⁾, I Putu Dharmanu Yudartha²⁾, Ni Wayan Supriliyani³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: dgitaananda@gmail.com¹⁾, p_dharmanu@unud.ac.id²⁾, supriliyani@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Background of the trouble on this look at is that instances of dengue fever in Badung Regency, specifically South Kuta, generally tend to range or range. The motive of this look at changed into to decide the overall performance of the Badung District Health Office in efforts to remove and manage dengue fever in South Kuta District. This studies makes use of a qualitative descriptive studies type. The outcomes of the studies carried out through researchers display that the overall performance of the Badung District Health Office in efforts to remove and manage dengue fever in South Kuta District is pretty accurate however desires improvement. Suggestions from this studies are the want for growing responsiveness to public court cases and the want for extra human resources.

Keywords: Performance, Countermeasures, Public Head Office, Dengue Fever, South Kuta

1. PENDAHULUAN

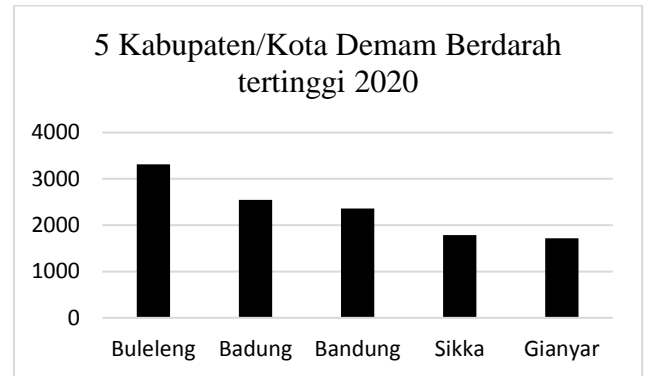
Demam berdarah Dengue atau yang sering disingkat DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes aegypti. DBD sendiri menjadi salah satu penyakit yang berbahaya dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat terlebih lagi jika menyerang anak-anak. Peran dan dukungan pemerintah sangat diperlukan di sini, yaitu sebagai akses jembatan masyarakat untuk mencegah penularan DBD dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini disebutkan bahwa peran masyarakat sendiri sangat penting baik dari segi pencegahan dan segi penularannya. Ketika pemerintah sudah mengedukasi masyarakat dan memberikan

pembekalan berupa informasi mengenai alur pencegahan dan penularan maka nantinya pemerintah mengharapkan masyarakat untuk merealisasikan semua hal tersebut. Tapi masyarakat tidak seharusnya 100% mengandalkan pemerintah dalam hal pencegahan demam berdarah itu sendiri. Hal ini dikarenakan semua elemen dalam suatu arus kehidupan baik pemerintah dan masyarakat harus seimbang mengeluarkan partisipasinya sebagai salah satu upaya pencegahan tidak hanya dalam kasus penularan DBD namun untuk semua kasus penularan penyakit yang sedang marak berkembang di masyarakat dan tentunya ketika semua hal tersebut sudah seimbang maka pemerintah dapat dikatakan berhasil

merealisasikan sebuah program kerja untuk melakukan pencegahan serta penularan penyakit DBD ini di masyarakat serta dapat memberikan amunisi bahwasanya keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat ini dapat menjadi salah satu point penting mengenai bagaimana sebenarnya pencegahan sebuah penyakit dengan mengandalkan keseimbangan partisipasi baik dari partisipasi masyarakat dan keseimbangan program kerja pemerintah itu sendiri.

Bali merupakan salah satu Provinsi endemis demam berdarah dan memiliki angka kasus demam berdarah yang cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kabupaten Badung menjadi salah Kabupaten dengan angka kasus demam berdarah yang realtif banyak. Menurut data dari Badan Pusat Stasistik (BPS) Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah padat penduduk dengan jarak rumah dengan rumah lainnya berdekatan. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran nyamuk dari rumah satu kerumah lainnya lebih mudah. Kabupaten Badung pernah dinyatakan sebagai 5 besar Kabupaten di Indonesia yang mendominasi angka kasus demam berdarah yang tertinggi pada tahun 2020 oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan angka kasus sebanyak 2570 kasus.

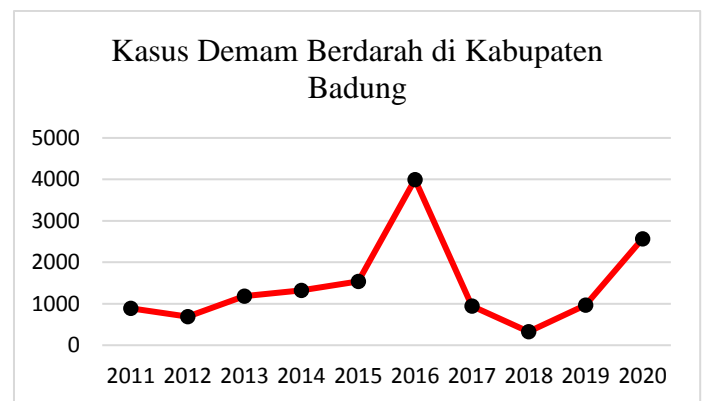
Gambar 1.1. Daerah kasus demam berdarah tertinggi di Indonesia tahun 2020



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyatakan, dalam periode januari hingga juli 2021 angka kasus demam berdarah di Kabupaten Badung mencapai 235 kasus. Hal ini menunjukkan penurunan angka kasus demam berdarah dari tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari grafik terjawab bahwa penyakit DBD dimasyarakat meningkat tiap tahunnya bahkan terjadi ketidakstabilan. Adapun data grafik kasus demam berdarah di Kabupaten Badung sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Grafik Perkembangan permasalahan DBD di Kabupaten Badung



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam pemberantasan dan penanggulangan demam berdarah. Menteri

Kesehatan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X2010 tentang penyakit menular dan penanggulangannya. Kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No.581/MenKes/SK/VII/1992 tentang pemberantasan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Pemerintah Kabupaten Badung juga melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan DBD, salah satunya dengan meningkatkan kinerja kader jumentik (juru pemandu jentik) melalui kegiatan GERTAK PSN (Gerak Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk) yang menjadi program kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang dilaksanakan di seluruh banjar yang ada di Kabupaten Badung, membuat aplikasi pelaporan kasus demam berdarah SIDBD (Sistem Informasi Pelaporan Kasus Demam Berdarah dan Pemantauan Jentik) Badung, memberikan pengarahan yang dilakukan oleh Jumentik sebagai upaya mengajak masyarakat berkontribusi dalam menekan kasus DBD di kabupaten Badung. Kemudian secara rutin melakukan fogging dilingkungan perumahan masyarakat. Namun sinkronisasi pemerataan antar partisipasi masyarakat dengan kebutuhan pemerintah belum dilakukan secara penuh. Kegiatan ini masih mengandalkan satu sektor dan satu pihak yang dimana belum menghasilkan pemerataan partisipasi antara masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan laporan Kabupaten Badung merupakan daerah endemis Demam Berdarah karena 6 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Badung termasuk ke dalam kategori daerah

endemis yaitu Kecamatan Mengwi, Abiansemal, Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Petang. Kasus terbanyak yang terjadi di Kabupaten Badung ialah Kecamatan Kuta Selatan.

Tabel 1. 1 Angka kasus demam berdarah per Kecamatan di Kabupaten Badung

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Mengwi	632	1252	289	124	294	155	2701
Abiansemal	247	850	205	46	106	298	1752
Kuta Selatan	825	1212	201	58	255	1067	3618
Kuta	118	163	43	31	124	492	971
Kuta Utara	321	321	171	68	246	502	1629
Petang	34	34	32	10	15	58	183
Total	2178	3832	942	337	1040	2570	10845

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis tertarik untuk melalukan penelitian dengan mengambil judul “Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Dalam Upaya Pemberantasan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Kuta Selatan”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006). Meliputi 5 indikator, sebagai berikut:

- a. Produktivitas
Produktivitas tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga efektivitas

layanan. Produktivitas diukur dengan relevansi input dan output.

- b. **Kualitas Layanan**
Kualitas pelayanan dapat diukur dari baik buruknya pelayanan yang diberikan, dan dari kepuasan orang yang menerimanya.
- c. **Responsivitas**
Daya tanggap digunakan sebagai indikator tenaga kerja karena secara langsung mewakili kemampuan organisasi publik untuk mencapai misi dan tujuannya.
- d. **Responsibilitas**
Responsibilitas juga merupakan kemampuan suatu organisasi untuk merespon masalah. Dapat diukur dengan kinerja kegiatan organisasi publik sesuai dengan prinsip manajemen yang sehat atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
- e. **Akuntabilitas**
Akuntabilitas organisasi dapat diukur dari tanggung jawabnya atas segala sesuatu yang dilakukannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Unit analisis penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Badung untuk Pencegahan Demam Berdarah. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling bertarget atau teknik purposive sampling. Informan-informan dalam penelitian ini diantaranya Kepala Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Koordinator Program Demam Berdarah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Puskesmas Kuta Selatan, Jumantik Kuta Selatan, Masyarakat yang pernah menderita penyakit DBD di Kuta Selatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

1. Indikator Produktivitas

Produktivitas dinas dalam penanganan penyakit DBD di daerah kuta selatan menunjukkan hasil yang berkorelasi dengan tujuan pelayanan kesehatan pemerintah kabupaten badung yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Indikator Kualitas Layanan

Kualitas layanan terlihat dari SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Sumber Daya Manusia yang dimaksud ialah para tenaga atau petugas yang bertugas dalam penanganan demam berdarah. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Badung membentuk berbagai fasilitas dalam bidang pelayanan kesehatan salah satunya Puskesmas. Puskesmas tersebut tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Badung salah satunya Kecamatan Kuta Selatan.

Tabel 4. 1 Petugas Puskesmas di Kecamatan Kuta Selatan

Puskesmas	Status Puskesmas	Jumlah Koordinator DBD	Jumlah Jumentik
Puskesmas Kuta Selatan	Induk	1	17
Puskesmas Tanjung Benoa	Pembantu	0	7
Puskesmas Ungasan	Pembantu	0	14
Puskesmas Jimbaran I	Pembantu	0	11
Puskesmas Jimbaran II	Pembantu	0	10
Puskesmas Pecatu	Pembantu	0	9
Puskesmas Kutuh	Pembantu	0	5

Sumber: Puskesmas Kuta Selatan

3. Indikator Responsivitas

Keluhan dan tuntutan datang ke Dinas Kesehatan Badung dari masyarakat untuk memenuhi tugas pemberantasan dan penanggulangan demam berdarah. Keluhan masyarakat menyangkan respon Dinas Kesehatan Kabupaten Badung terhadap seruan pemberantasan dan penanggulangan DBD alias kabut asap.

4. Indikator Responsibilitas

Pelaksanaan kegiatan pemberantasan dan penanggulangann demam berdarah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tidak seluruhnya mengikuti SOP, atau dapat dikatakan mengikuti permasalahan yang ada di masyarakat atau lapangan. Namun, sekitar 75% kegiatan dalam penangan demam berdarah ini mengikuti SOP.

5. Indikator Akuntabilitas

Ada laporan bulanan dan penilaian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tentang kasus DBD di Kabupaten Kuta Selatan dan transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana untuk pengobatan DBD.

Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas

Faktor Penghambat

- Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bagaimana demam berdarah dan program penanganannya.
- Lingkungan wilayah yang cenderung padat penduduk dan memiliki luas wilayah yang besar, membuat petugas dalam melakukan pemberantasan dan penanggulangan demam berdarah kesulitan dalam menjalankan program.

Faktor Pendukung

- Kelengkapan alat penunjang kesehatan dapat membantu penanganan DBD secara cepat.
- Evaluasi yang diberikan Dinas Kesehatan Badung terhadap Puskesmas dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan demam berdarah.
- Anggaran atau dana yang diperlukan dalam pemberantasan dan penanggulangan demam berdarah sudah ada, dana tersebut di ambil dari APBD dan dana BOK.

Rekomendasi

- Kita perlu meningkatkan sosialisasi masyarakat. Baik melalui sosialisasi langsung maupun melalui media sosial.
- Keadaan lingkungan dan masyarakat di Kuta Selatan cenderung padat

penduduk, dan hampir semua rumah berdekatan. Sedangkan, penyebaran demam berdarah akan lebih rentan dengan jarak rumah yang berdekatan. Dengan hal ini agar pengecekan jentik oleh Kader Jumantik lebih dilakukan secara optimal.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Kinerja Dinas Kesehatan dalam penanggulangan dan pemberasan demam berdarah di Kecamatan Kuta Selatan terukur cukup baik, namun perlu adanya peningkatan kinerja terutama dalam indikator produktivitas dan kualitas layanan. Hasil ini diperoleh berdasarkan analisa pada 5 indikator pengukuran kinerja organisasi publik menurut Dwiyanto (2006).

Saran

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung diharapkan dapat lebih cepat menerima pengaduan dan sumbangan masyarakat serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kedepannya.
2. Dalam pemberantasan dan pengendalian DBD, masih ada ruang untuk perbaikan baik bagi pelayanan kesehatan maupun petugas Puskesmas, khususnya koordinator DBD, agar lebih fokus pada masalah DBD di Kabupaten Kuta Selatan. .
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung harus dapat memanfaatkan

perkembangan teknologi yang ada dalam memudahkan penanganan demam berdarah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Agus Dwiyanto, dkk. (2017). Reformasi Birokrasi Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Arsin, A.Arsunan. 2013. Epidemiologi Demam Berdarah Dengue Di Indonesia. Masagena press

Kaswandani, N., & Sastroasmoro, S. (2014). Penelitian Kualitatif. Dalam S. Sastroasmoro, & S. Ismael, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis (hal. 289-300). Jakarta: CV. Sagung Seto.

Sumber Jurnal atau Penelitian

Dwiari, Aryani. 2010. Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2008. Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Yudhartha, Putu Dharmanu, Supriyanti, N, W. 2019. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Diakses dari laman <https://simdos.unud.ac.id/pdf>. Pada 1 Agustus 2022.

Sumber Artikel:

Wahyuni, Putu. 2020. 3 Daerah di Provinsi Bali Penyandang tertinggi DBD secara Nasional. Diakses dari laman <https://nasional.simdonesw.com/artikel> pada 1 agustus 2022.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya.